



UKI PRESS
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**SEMINAR NASIONAL &
CALL FOR PAPERS**
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018
Auditorium Griha William Soeryadjaya
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

PROSIDING

“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

Susunan Panitia

Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA
(Rektor UKI)
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA
Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)

Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K
Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya

Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.
Dr. Demsi Jura, M.Th.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsy Jura, M.Th.

PROSIDING

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN
BERDASARKAN PANCASILA”**

Reviewer:

Dr. Demsey Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor:

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsey Jura, M.Th.

ISBN: 978-979-8148-96-5

Penerbit
UKI Press
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp.(021)8092425, ukipress@uki.ac.id
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Keynote Speakers		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
Speakers		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
Pemakalah		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiori (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksin (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional

Biondi Sima & Zeva Sudana

Abstrak

Sejak Indonesia memasuki era Orde Baru, semakin banyak aktor-aktor non-negara yang berperan aktif dan berkontribusi melalui sektor masing-masing untuk kemajuan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Perjuangan ini termasuk yang dilakukan pihak-pihak yang bergelut aktif di platform-platform multilateral melalui jalur diplomasi. Tidak hanya pihak pemerintah yang memiliki kapabilitas dan akses untuk melakukan ini, tapi berbagai aktor non-negara berupa Civil Society Organisations (CSOs) pun memiliki kemampuan berdiplomasi seperti organisasi kepemudaan bernama Indonesian Youth Diplomacy yang didukung secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Di tengah perkembangan percaturan politik dunia dimana efektifitas dan eligibilitas multilateralisme dipertanyakan melalui tren anti-multilateralisme, melalui artikel ini penulis menjabarkan berdasarkan teori Multilateralisme dari Robert Keohane, bagaimana pemuda/i Indonesia tetap memiliki peran penting dan kemampuan mewakili negara, menyuarakan pendapat, menjalin jaringan dan membuat gerakan-gerakan di ruang lingkup multilateralisme menggunakan diplomasi multilateral untuk membantu memberi pencerahan pada permasalahan nasional dan internasional. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global dan diplomasi multilateral merupakan garda depan bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional demi kebaikan nasional, regional dan internasional.

Kata Kunci: diplomasi, multilateralisme, kepemudaan, Pancasila, kedaulatan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, hubungan internasional.

I. Pendahuluan

Tanggal 8 Oktober 2018 menandakan bahwa 90 tahun telah berlalu sejak teks Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh Mohammad Yamin dikumandangkan di Kongres Pemuda II pada 1928 di tengah penjagaan ketat dari para polisi Belanda. Teks yang diresmikan dalam Keppres No.316 Tahun 1959 ini ibarat akar tangguh yang menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kekuatan untuk tidak hanya berkumpul menyuarakan suatu keputusan bahkan saat dalam situasi pelikpun, namun juga mampu bersatu di tengah kemajemukan yang merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia.

Seiring dengan semakin berkembangnya Republik Indonesia sejak merdeka dari tangan Belanda pada tahun 1945, memasuki abad ke-21 Indonesia merupakan negara yang konsisten bebas dan aktif terlibat dalam dinamika perpolitikan internasional. Suara Indonesia tidak hanya berpengaruh di percaturan kawasan regional saja namun juga dipertimbangkan secara global. Pemerintahan Joko Widodo yang menetapkan gagasan strategis “Indonesia akan menjadi poros maritim dunia”, memahami sekali potensi besar negara yang mengarungi dua

samudera dan dua benua ini. Banyak yang masih belum tersentuh dan akan terus dikembangkan, terutama melihat fakta bahwa pusat gravitasi politik dan ekonomi dunia sekarang cenderung bergeser ke Asia, terutama kawasan Asia Timur. Kondisi ini memantapkan posisi Indonesia termasuk generasi mudanya untuk terus aktif, representatif dan bertanggung-jawab saat mewakili bangsa Indonesia dalam platform-platform multilateral. Tidak hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia, Indonesia-pun sebagai warga global dapat bersuara terhadap berbagai isu dan kasus global. Ini didukung oleh kebijakan-kebijakan hak-hak asasi manusia yang dianut Indonesia selaras dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Lecarte, 2014) yang, walaupun tidak mengikat secara hukum, merupakan manifesto pengaturan standar-standar dengan otoritas moral tertinggi.

Jika melihat kondisi terkini terutama sejak satu dekade ke belakang, telah terjadi berbagai bentuk disintegrasi multilateralisme (EU Parliament, 2017). Tidak hanya bahwa multilateralisme mendapat kritikan tajam karena platform-platform multilateral yang menjunjung tinggi pemerintahan global dicap kurang efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan global secara riil, namun juga terjadi kebangkitan nasionalisme populis di berbagai negara dengan berbagai macam kadarnya. Walau terdapat kondisi-kondisi ini, contohnya seperti kritikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mempunyai gigi untuk menyelesaikan isu-isu krusial yang sensitif, ASEAN kurang efektif dengan prinsip *non-interference*-nya, Brexit merupakan indikasi kuat Uni Eropa tidak menguntungkan anggotanya secara ekonomi, hingga superioritas Presiden Donald Trump untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang akan *Make America Great Again* walaupun kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengganggu berbagai keputusan pemerintahan global, penulis percaya bahwa multilateralisme termasuk platform-platform multilateral yang ada, tetaplah diperlukan. Ini dikarenakan negara-negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia, tidak dapat berjalan sendiri dan saling terhubung di berbagai sektor “ipoleksosbudhankam”. Selain itu identitas kemajemukan Indonesia yang dapat di bawa ke kancah internasional melalui delegasi-delegasi Indonesia di platform-platform multilateral, memiliki kemampuan untuk semakin menyatukan rasa memiliki bangsa Indonesia yang majemuk ini dan membawa kebanggaan dan peran tersendiri di dalam maupun luar negeri.

Tidak dipungkiri bahwa multilateralisme memang sering dipertanyakan. Berdasarkan kondisi ini, makalah ini hendak merumuskan dan menjawab **bagaimana aktor-aktor non-negara, khususnya pemuda, memainkan peranan untuk meminimalisir tren anti-multilateralisme?** Istilah aktor-aktor non-negara sendiri adalah pemangku-pemangku kepentingan yang berupa organisasi dan individu yang tidak berafiliasi dengan, disutradarai oleh, atau didanai melalui pemerintah. Ini termasuk perusahaan, CSOs, lembaga keuangan swasta, serta kelompok-kelompok lawan (ESCR net, n.d.). Makalah ini akan berfokus pada aktor non-negara yaitu CSOs yang berupa organisasi kepemudaan yakni Indonesian Youth Diplomacy. Melalui makalah ini, penulis bertujuan untuk menampilkan peran penting generasi muda Indonesia membawa identitas kemajemukannya dalam multilateralisme melalui diplomasi multilateral. Peranan

ini sangat penting untuk diteruskan oleh generasi-generasi muda Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang karena akan membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mendorong peran dan tanggung jawab negara yang lebih signifikan dari tingkat nasional hingga global. Indonesia melalui generasi mudanya dapat meraup manfaat dengan membantu membentuk rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan peran generasi muda dan berdampak pada kalangan generasi muda hingga melengkapi kekosongan literatur tentang peran generasi muda dalam diplomasi multilateral.

Multilateralisme akan digunakan untuk menganalisa kapasitas aktor-aktor non negara, termasuk Indonesian Youth Diplomacy, dalam mengambil alih tren anti-multilateralisme. Multilateralisme adalah praktik koordinasi kebijakan-kebijakan nasional dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih negara melalui pengaturan ad-hoc atau melalui lembaga-lembaga (Keohane, 1990). Multilateralisme sendiri bisa dilihat sebagai suatu bentuk pemerintahan global dimana platform-platform multilateral memiliki peranan penting dalam pengelolaan berbagai perubahan regional dan global dalam sistem dunia saat ini. Norma-norma dan lembaga-lembaga multilateral telah membantu menstabilkan atau setidaknya meminimalisir konsekuensi-konsekuensi internasional yang ada. Terdapat juga konotasi normatif dan politis dalam multilateralisme yang juga memiliki komitmen terhadap sistem berbasis aturan, prinsip universalitas dan tata kelola oleh lembaga-lembaga internasional (Ruggie, 1992; Kahler, 1992; Caporaso, 1992).

Penulisan makalah ini menggunakan data sekunder yang ditelusuri melalui studi literatur beberapa buku dan naskah artikel online. Penulis juga mengumpulkan data primer melalui polling U-report oleh UNICEF sebanyak dua kali, di tahun 2017 dan 2018 dengan lebih dari 3,000 responden, menggunakan bot melalui kotak masuk sosial media. Isu-isu polling yang dikumpulkan terkait agenda yang diangkat oleh negara tuan rumah G20 yang juga berkaitan dengan pemuda dan multilateralisme.

II. Pembahasan

1. Fenomena Global: Politik Identitas dan Peran Multilateralisme

Jika kita menilik berbagai kasus dari berbagai penjuru dunia yang berhubungan dengan identitas politik, kita dapat melihat bahwa di era modernitas yang lebih maju ini masih terdapat banyak pihak yang mempersekusikan suatu kaum karena identitas mereka. Kita akan dihadapkan berbagai pertanyaan mengenai apa sebenarnya arti nasionalisme dan multilateralisme dan apakah keduanya dapat saling menyokong melindungi hak-hak asasi di tingkat individual, kelompok, negara hingga suatu wilayah regional. Namun nyatanya tidak selalu semudah itu. Kompleksitas ini terdiri dari berbagai isu seperti persekusi identitas minoritas, ketidakadilan proses pembentukan kebijakan suatu pemerintahan, dampak dari kompetisi ekonomi, proteksi sumber daya suatu negara yang belum tentu tepat sasaran, dan fasilitas yang kurang efektif untuk anak muda agar dapat berperan secara maksimal dalam membantu memberikan kontribusi terhadap berbagai isu nasional dan internasional.

Mengenai persekusi identitas minoritas di luar negeri, salah satu kasus menarik adalah kasus kaum Yazidi yang populasinya berjumlah kurang lebih 500,000 orang. Kaum ini mengalami genosida yang dilakukan oleh ISIS sejak 3 Agustus 2014. Setidaknya 6,000 wanita dan anak-anak hilang atau di sandera oleh ISIS hingga Juni 2018 (The National, 2018). Yazidi adalah etnik dan kaum agama minoritas di Irak dan di cap oleh ISIS sebagai para “penyembah Iblis”. Agama kuno ini dikabarkan didirikan oleh syekh Ummayyad pada abad ke-11 dan berakar dari percampuran Zoroastrianisme (menghormati api sebagai manifestasi dari Tuhan), Kristen (pembaptisan) dan juga Islam (penyunatan). Namun agama ini tidak meyakini sebagai turunan dari Abraham/Ibrahim. Karena ini Yazidi seringkali di cap sebagai suatu sekte. Mereka dipaksa melarikan diri ke Gunung Sinjar di wilayah barat laut Irak, atau menghadapi pembantaian oleh ISIS. Mereka diberi kecaman yang berawal dari Al-Qaeda sebelum ISIS terbentuk dan diteruskan oleh ISIS, yang menyetujui pembunuhan terhadap kaum ini. Nadya Murad (News Day, 2017), seorang wanita Yazidi yang bertahan hidup setelah mengalami kekerasan seksual dari tentara ISIS, dinobatkan sebagai Duta Besar Goodwill PBB pertama untuk Martabat Orang yang Bertahan Hidup dari Perdagangan Manusia. Selain kaum Yazidi, ada juga kaum Rohingya. Kaum Rohingya (Al-Jazeera, 2018) adalah kelompok etnis yang mayoritas dari mereka adalah Muslim.

Mereka hidup berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Per April 2018, ada 1.1 juta Rohingya di dunia. Mereka memiliki dialek yang berbeda dari mayoritas di Myanmar, yaitu Ruingga dan tidak dianggap sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi negara Myanmar sejak 1982. Ini otomatis membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Sejak tahun 1970an, sejumlah tindakan keras terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, serta Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selama penindasan tersebut, para pengungsi sering melaporkan terjadinya pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran dan pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar. Sebelum kekerasan yang dimulai pada bulan Agustus 2017, PBB memperkirakan bahwa ada sebanyak 925.000 pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Selain itu, dikatakan ada sekitar 120.000 pengungsi internal Rohingya. Untuk tahun 2018 (UN, 2018), terdapat perkiraan bahwa kurang-lebih 700,000 refugee Rohingya bermukim di Bangladesh, kebanyakan dari mereka berada di Cox’s Bazaar yang kini adalah pemukiman refugee terbesar di dunia.

Satu lagi contoh persekusi identitas adalah kasus Tibet-China. Bagi China, pihak Tibet dilihat sebagai gerakan separatis. Konflik kedua pihak ini berlangsung sejak 1951 (The Logical Indian, 2017) dimana China menduduki dan memerintah atas Tibet menggunakan strategi sistematis yang dapat dibilang memiliki tujuan untuk menghancurkan budaya dan identitas mereka atau dapat juga disebut genosida budaya. Salah satu cara adalah penandatanganan di bawah tekanan melalui “Seventeen Point Agreement”. Walau perjanjian ini memberikan otonomi terhadap Tibet dan memberi hormat kepada agama Buddha, perjanjian ini melancarkan diperbolehkannya pendirian markas sipil dan militer China di ibukota Tibet yaitu Lhasa. Dalai Lama ke-14, sebagai seorang tokoh spiritual dan

politik ternama bagi kaum Tibet, bersama menteri-menteri dan 80,000 rakyat Tibet, melarikan diri secara exile ke India saat terjadi usaha penggulingan pemerintah China pada tahun 1959. Puluhan ribu orang Tibet meninggal di aksi pemberontakan itu.

Bagaimana multilateralisme berperan dalam usaha menyelesaikan kasus Yazidi, Rohingya, dan Tibet? Karena kasus-kasus tersebut sudah tidak dapat sepenuhnya di kendalikan oleh pemerintah nasional masing-masing negara dan sudah menyangkut ketidakpatuhan terhadap nilai universal dari HAM, berbagai lembaga organisasi internasional berusaha untuk bantu memecahkan masalah dan memberikan solusi. Memang sayang bahwa secara keseluruhan intervensi dan koordinasi kebijakan dan implementasi norma universal nyatanya kurang efektif, maka dari itu konflik-konflik ini terus berlanjut hingga bertahun-tahun. Namun, berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat global tidak sepenuhnya diam dan terus berusaha. Untuk kasus Yazidi contohnya, dikeluarkan pada tahun 2017 Resolusi 2379 oleh Dewan Keamanan PBB (UN,2017) yang di adopsi secara bulat bahwa diperlukannya pembentukan tim investigasi independen untuk mendukung upaya domestik agar ISIS bertanggung jawab atas tindakan mereka di Irak, termasuk persekusi terhadap kaum Yazidi. Berbagai platform multilateral seperti PBB dan Parlemen Eropa juga memfasilitasi Nadya Murad (New York Times,2018) untuk menceritakan pengalamannya sebagai wanita Yazidi. Gunanya adalah untuk mengedukasi publik secara jauh lebih luas dan mendorong lobi agar isu Yazidi lebih diperjuangkan. Ini tidak akan dapat terjadi tanpa platform multilateral. Untuk kasus warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, berbagai usaha juga dilakukan untuk memitigasi konflik melalui platform multilateral.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Liputan 6, 2018) menekankan kepada anggota ASEAN untuk lebih serius dalam berkomitmen mengatasi masalah Rohingya pada sesi pleno KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Selasa 13 November 2018. Peran dari AHA Centre milik ASEAN yang berkecimpung di bidang koordinasi manajemen bencana akan membesar dan semakin didukung oleh pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis Rohingya yang sudah tercatat sebagai bencana kemanusiaan melalui pembaharuan mandat dan mekanisme. Isu ini sangat berdampak secara regional karena sejak Agustus 2017 kurang-lebih 700.000 warga etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Untuk kasus Tibet, selain berbagai resolusi yang dikeluarkan PBB, dapat juga digunakan sebagai contoh adalah suatu CSO internasional yang berdiri sejak tahun 1988 dengan keanggotaan dari berbagai negara yang berusaha untuk mengkampanyekan hak-hak warga Tibet. Adalah International Campaign for Tibet (ICT, 2018), sebuah NGO internasional yang mengadvokasikan berbagai mekanisme PBB agar membantu mengangkat isu-isu Tibet di panggung internasional. Contoh upaya antar-negara yang dilakukan adalah menghadiri konferensi PBB, memberi kesaksian di hadapan komisi PBB dan memohon kepada Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja PBB. Kantor dari ICT tersebar di Berlin, Washington DC, Amsterdam, Brussels dan Dharamsala di India.

Selain persekusi identitas, ada juga kasus regional yaitu Brexit yang dicanangkan akan rampung pada 29 Maret 2019 sejak diusulkan tahun 2017 dan menghabiskan dana alias “divorce bill” sebesar £39bn. Brexit ini berawal dari perdebatan nasionalisme vs regionalisme dan kestabilan sistem keuangan dan ekonomi karena pasang surut Uni Eropa namun merambat juga ke berbagai isu sekunder lainnya yang berkaitan dengan ras dan agama karena mulai bermunculan sentimen nasionalisme tinggi di masyarakat Inggris yang anti-imigran dan anti-pendatang. Sejak diadakannya referendum atau pemungutan suara pada 23 Juni 2016 untuk memutuskan apakah Inggris harus tetap atau meninggalkan Uni Eropa, keputusan mayoritas yang memberi suara sudah bulat. Hasil-pun tidak beda jauh dengan 51.9% memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dan 48.1% memilih untuk tetap bergabung di Uni Eropa (BBC,2018). Jumlah pemilih referendum adalah 71.8% dengan lebih dari 30 juta partisipan. Kasus ini sangat berdampak khususnya pada Uni Eropa dari segi ekonomi dan keuangan. Berdasarkan Pasal 50 Perjanjian Lisbon yang memberi kedua belah pihak dua tahun untuk menyetujui ketentuan perpecahan, proses ini legal untuk dilakukan. Pada bulan November 2018, setelah bernegosiasi secara alot, para pejabat Inggris dan Uni Eropa telah menyetujui secara teknis naskah teks Perjanjian Brexit (BBC, 2018). Pada akhir November nanti direncanakan akan dilaksanakannya penandatanganan kesepakatan. Kasus ini juga menjadi sensitif karena posisi Irlandia Utara di dalam proses ini, terpecahnya rakyat Inggris sendiri akan kasus ini dan pro-kontra sejauh mana Uni Eropa tetap memiliki kendali melalui peraturan perdagangan karena kedua pihak memiliki sejarah sangat panjang perihal ketergantungan secara ekonomi. Brexit adalah contoh bagaimana platform multilateralisme dapat menurun dalam pengaruhnya, namun dibalik itu faktor ketergantungan tetaplah ada, setidaknya selama masa transisi hingga 31 Desember 2020, apalagi hubungan antar-negara khususnya perdagangan dan keuangan masih dapat terlihat. Yang jelas dengan adanya Brexit ini akan secara langsung berdampak terhadap berbagai peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan warga negara Inggris yang berdomisili di Inggris dan Uni Eropa.

Sentimen identitas juga terjadi dalam konteks domestik dan bilateral di Amerika Serikat. Dalam konteks domestik, terpilihnya Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat menjadi babak baru politik Amerika yang dipimpin oleh partai Republikan. Partai ini umumnya mengutamakan konstituen berkerah putih, kelas menengah ke atas, dan pihak swasta. Jenis kebijakan yang umumnya dipromosikan berbentuk peringan pajak dan liberalisasi perusahaan sumber daya. Trump sendiri konsisten dengan arus kebijakan ini namun dalam spektrum yang jauh lebih ekstrem.

Nasionalisme ekonomi Trump yang sering dijuluki dengan jargon “America First” berpusat pada enam aktivitas utama: (i) membatalkan penundaan deportasi untuk imigran yang tiba di Amerika saat masih di bawah umur, atau dikenal dengan program DACA (Deferred Action for Childhood Arrival) yang diprakarsai presiden Barrack Obama, (ii) membatasi pengeluaran visa dan izin berkunjung untuk delapan negara (termasuk Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yemen), (iii) memperketat pengawasan penerimaan pencari suaka dari luar negeri, (iv) memasukkan 25 miliar USD ke dalam budget pendanaan

pembangunan dinding pemisah di garis batas administrasi Amerika Serikat dan Meksiko, (v) meninjau ulang program visa H-1B yang banyak dipakai industri di Silicon Valley untuk mempekerjakan tenaga asing secara jarak jauh, (vi) memangkas tingkat imigrasi legal dan pencari lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. termasuk jumlah Green Card yang akan dikeluarkan (The Balance, 2018).

Kebijakan-kebijakan ini tentunya menuai banyak kontroversi, terutama karena kecenderungan yang dinilai anti-imigran, dan di beberapa kasus, anti-Muslim. Beberapa kebijakan lain juga dinilai bertolak belakang dengan nilai multilateralisme yang selama ini dijunjung oleh Amerika Serikat, termasuk rencana keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, yang akan menjadi kemunduran signifikan dalam upaya mencegah kenaikan permukaan air laut dan dampak korosif lingkungan lainnya, mengingat Amerika adalah salah satu penyumbang karbon dan polutan terbesar di dunia.

Dalam konteks bilateral, salah satu isu yang sangat menarik perhatian dunia adalah perang perdagangan antara Amerika dan Tiongkok. Amerika menerapkan berbagai seri kenaikan tariff barang-barang impor dari Tiongkok, termasuk aluminium, baja, dan beberapa barang elektronik lainnya, senilai lebih dari USD 250 milyar. Kebijakan ini dinilai AS sebagai bentuk respon untuk mengembalikan lapangan kerja lewat aktivasi industri dalam negeri untuk pasar domestik, serta konsekuensi dari kebijakan Tiongkok yang dianggap sering mengapropriasi hak cipta beberapa inovasi teknologi AS. Kebijakan ini dibalas oleh Tiongkok melalui penerapan tarif yang meningkat secara gradual untuk impor barang AS ke Tiongkok hingga sebesar USD 110 milyar. Walaupun volume perdagangan keduanya relatif kecil bila dibandingkan dengan besaran perekonomian, dengan makin terintegrasinya ekonomi global, rantai nilai global otomatis akan terpengaruh lewat perang tarif Amerika Serikat dan Tiongkok. Sejumlah upaya untuk meremediasi perang tarif ini tengah difasilitasi oleh beberapa negara tetangga, semisal Kanada, dan melalui upaya multilateral melalui WTO. Namun konsisten dengan kebijakan Trump yang tidak mengindahkan upaya multilateral, administrasi ini justru mengancam akan keluar dari rejim WTO dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan upaya harmonisasi perdagangan. Hal ini menjadi semakin ironis karena perekonomian AS bertumbuh semakin pesat lewat kebijakan isolasi ini, ditambah dengan kebijakan peningkatan suku bunga Federal Reserves yang membuat aliran dana keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan masuk kembali ke dalam pasar investasi AS. Pertanyaannya kini apakah upaya multilateralisme benar-benar dapat membawa keuntungan secara adil untuk semua pihak? Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia dan pemuda terhadap multilateralisme di tengah tren politik identitas dan anti globalisasi ini?

Jika ingin melihat bagaimana peran Indonesia dalam menangani isu-isu internasional termasuk melalui platform-platform multilateral, hal pertama yang harus kita lihat adalah mengenai prinsip bebas aktif (Kemlu,2016). Prinsip ini sudah melekat dengan Indonesia sejak masa Soekarno karena beliau mencetuskannya. Jika kita melihat kegunaannya di masa modern, memang terdapat berbagai macam kompleksitas yang harus disesuaikan lagi tergantung per-kasus jika ingin menentukan arah pelaksanaan prinsip ini melalui kebijakan

luar negeri Indonesia. Yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional Indonesia agar rakyat Indonesia merasakan manfaatnya tapi seiring dengan itu Indonesia akan tetap merangkul prinsip-prinsip universal karena Indonesia-pun mendukung Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia (UDHR) dan merupakan anggota dari berbagai badan regional seperti ASEAN dan global seperti PBB. Mempertahankan kerjasama internasional untuk menangani berbagai kasus yang berdampak secara regional dan global merupakan agenda penting khususnya melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia. Terutama untuk kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap Indonesia seperti perubahan iklim, terorisme, hingga bencana kemanusiaan regional yang dapat memberikan efek domino terhadap Indonesia. Selain peran pihak pemerintah seperti para diplomat tradisional Indonesia, generasi muda Indonesia-pun dapat turut andil untuk membantu menyuarakan kepentingan Indonesia dan posisi Indonesia terhadap berbagai isu melalui platform multilateral. Lebih dari itu, generasi muda Indonesia dapat berkontribusi melalui pemikiran-pemikiran mereka sendiri dalam pemecahan berbagai masalah. Dengan kondisi global dimana kita semua saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung karena perkembangan teknologi termasuk teknologi digital, sudah sejak satu dekade yang lalu suara generasi muda semakin diperhitungkan, khususnya melalui platform multilateral yang memiliki segmen untuk generasi muda ataupun melibatkan langsung generasi muda ini dalam proses pembentukan kebijakan. Salah satu contoh adalah bagaimana G20 Summit memiliki kelompok kerja khusus generasi muda yang diberi nama Y20 Summit.

2. Pandangan terhadap Multilateralisme: Lanskap Politik Domestik

Melalui politik bebas-aktif dan besaran wilayah dan populasi, Indonesia memainkan peran yang cukup signifikan dalam percaturan politik dan ekonomi global. Signifikansi ini ditunjukkan lewat keanggotaan Indonesia di forum multilateral negara-negara maju dan berkembang dengan perekonomian terbesar di dunia, G-20. Diinisiasi di tahun 2008, G-20 merepresentasikan 80% perdagangan dunia, 85% total output barang, dan dua pertiga populasi dunia. Peran penting Indonesia dalam forum multilateral dapat ditarik ke belakang di tahun 1955 saat inisiasi Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan di tahun 1967 saat pembentukan ASEAN, dua momentum penting yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan regional Asia Tenggara dan dalam pergerakan negara berkembang dan negara non blok. Kebijakan luar negeri ini tentunya tidak terlepas dari situasi politik dalam negeri. Lewat pergantian administrasi kepresidenan sebanyak delapan kali sejak kemerdekaannya, politik luar negeri Indonesia juga diwarnai berbagai moderasi dan perubahan proyeksi nasionalisme, pembangunan ekonomi, dan politik domestik, terhadap orientasi eksternal dan kebijakan luar negeri. Berikut adalah tabel strategi, tujuan, dan cakupan kebijakan luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan (1945) sampai pada era kepresidenan sebelum presiden petahana Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (Yani, 2009).

Table 1. Indonesian Foreign Policy: Change and Continuity

Governments	The Primacy of Domestic Context			Performance of Foreign Policy	External Orientation
	Nationalism	Economic Development	Domestic Politics		
SOEKARNO (1945-1965)	struggle for independence	- socialism - self-sufficient	-multi-party system - liberal democracy 6 democracy	-free & active based on East-West conflict - non-alignment -as a political weapon of competing political forces	High Profile but erratic
SOEHARTO (1965-May 1998)	national building (internal stability and economic development)	-capitalism (1967-1997) -regional crisis (1997 – 1998)	-single majority party system -pancasila democracy -dual function of ABRI -centralised authoritarian rule -human right abuses	-free & active based on economic-oriented - pseudo-non-alignment -advancing domestic political interests of the ruling regime	(1965-1980s) Low Profile and consistent (mid 1980s-1998) High Profile but erratic
HABIBIE (1998 – Oct 1999)	-disintegration -East Timor's exit	- a deepening crisis	-multi-party system -pancasila democracy -declining of TNI's role	- foreign aid diplomacy - under pressure of the international community	Low Profile and consistent
ABDURAHMAN WAHID (1999- July 2001)	-separatism -disintegration -ethic conflicts	-a crippled Indonesia	- multi-party system -transition era to civic democracy	-disorientation -mismanaged foreign policy	High Profile but erratic
MEGAWATI SOEKARNOPTRI (2001-oct 2004)	-separatism -disintegration -ethic conflicts	-the awakening Indonesia	-multi-party system -democratic consolidation -introduction of regional autonomy - the emergence of Islamic political management forces - new military role	- free & active based on economic-oriented -reformation on foreign policy	Low Profile and consistent
YUDHOYONO (2004 – now)	-separatism -disintegration -ethic conflicts -national building	-a confident Indonesia	-multi-party system -civic democracy -the implementation of regional autonomy -competing of Islamic versus nationalistic pol. forces - the implementation of new military role	-free & active based on navigating in a turbulence ocean -constructive mindset -connectivity -reflect true brand of Indonesian nationalism	High Profile and consistent

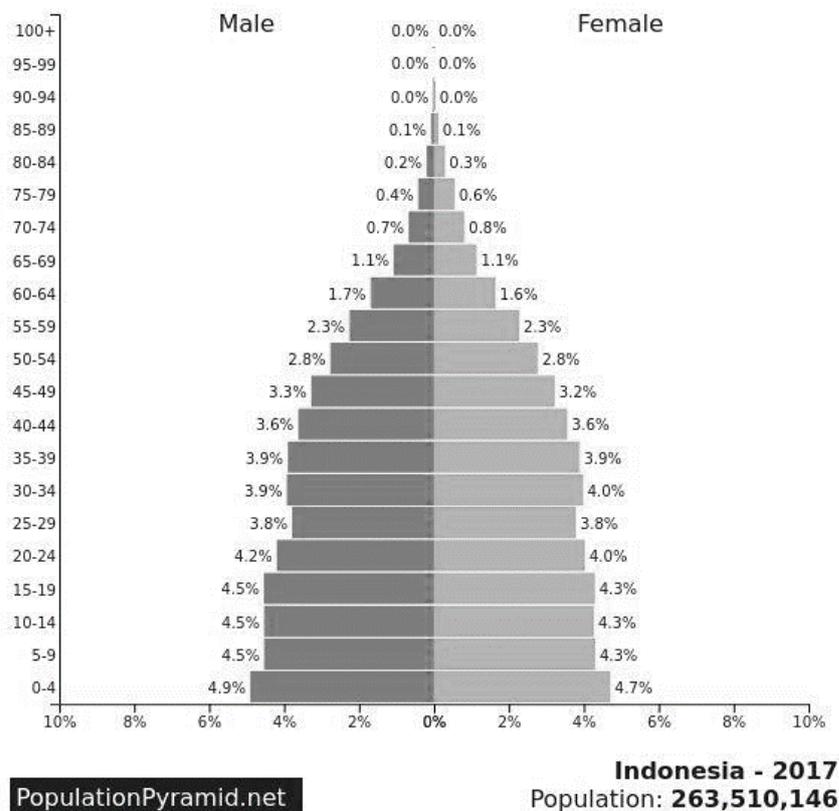
Table 2. Periods of Indonesia's Foreign Policy

Governments	Foreign Policy		
	Scope	Goals	Strategy
SOEKARNO	Globalist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struggle for independence 2. Anti-colonialism 3. Economic stability 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negotiation 2. Military force 1. Containment 2. Military force 1. Foreign aid 2. Self-sufficient
SOEHARTO (1965-1998)	regionalist (1965-1992) globalist (1992-1997)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic stability and promote liberal economy 2. Political stability and security 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Private investment 2. Foreign aid diplomacy 3. Free trade 1. Military force 2. Regional resilience
HABIBIE (1998-Oct 1999)	regionalist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic stability 2. Political stability and security 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Private investment 2. Foreign aid diplomacy 3. Free trade 1. Military force 2. Democratisation of political system
ABDURAHMAN WAHID (1999-July 2001)	globalist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic stability 2. Political stability and security 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Private investment 2. Foreign aid diplomacy 3. Free trade 1. International support 2. Regional autonomy 3. Democratisation of political system
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2001-Oct 2004)	regionalist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic stability 2. Political stability and security 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Private investment 2. Foreign aid diplomacy 3. Free trade 1. International support 2. Regional autonomy 3. Democratisation of political system
YUDHOYONO (2004 – now)	regionalist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Economic stability 2. Political stability and security 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Private investment 2. Foreign aid diplomacy 3. Free trade 1. International support 2. Regional autonomy 3. Democratisation of political system

Kedua tabel ini menunjukkan dinamika pemerintahan domestik yang memengaruhi strategi, tujuan dan lingkup kebijakan luar negeri. Masing-masing kepresidenan memiliki tren unik yang akan menentukan apakah Indonesia cenderung menjadi *inward* atau *outward looking* dalam periode tertentu. Ini mengapa kemampuan aktor non-pemerintah, termasuk pemuda, menjadi penting untuk menjadi jangkar kontrol kebijakan luar negeri dari dalam negeri dari waktu ke waktu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemuda mampu memainkan peran untuk turut memengaruhi alur pengambilan kebijakan, baik secara domestik dan melalui kanal multilateral, terutama untuk mendorong identitas kemajemukan bangsa Indonesia di kancah internasional.

Peran Generasi Muda di Gerakan dan Forum Multilateral

Indonesia adalah negara dengan demografi yang dominan muda. Piramida populasi Indonesia (lihat gambar) menunjukkan bahwa 24.27% populasi Indonesia berusia di antara 16 sampai 30 tahun (Susenas, 2017). Ini berarti ada lebih dari 63 juta pemuda yang mencakup hampir sepertiga total populasi. Secara politik, angka ini termasuk kekuatan yang besar sudah sepatutnya diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan.



Gambar 1. Piramida Populasi Indonesia tahun 2017

Indonesian Youth Diplomacy, sebelumnya bernama G20 Youth Indonesia, dibentuk di tahun 2010 dengan gagasan bahwa pemuda perlu secara aktif dan kolektif menampung aspirasi pemuda untuk direpresentasikan dalam forum internasional. Secara konsisten, setiap tahunnya IYD telah mengirimkan delegasi pemuda, secara berturut-turut di Vancouver, Paris, Washington DC, London, St. Petersburg, Sydney, Istanbul, Shanghai dan Beijing, Berlin, dan Kordoba, untuk mewakili aspirasi pemuda/i Indonesia di Y20 Summit. Y20 Summit sendiri, sejak 2013, menjadi *engagement group* resmi dari G20's Leaders Summit yang dihadiri oleh kepala negara, menteri keuangan, dan kepala bank sentral, yang membahas isu-isu financial dan non-financial global. Isu non-finansial umumnya merespon fenomena yang memerlukan koordinasi multilateral yang cukup mendesak, seperti isu Ebola di G20 2014, isu pengungsi Suriah di G20 2015, dan masa depan ketenagakerjaan di G20 2018. Skala G20 yang mencakup kekuatan ekonomi besar dunia mampu memfasilitasi koordinasi antar negara secara lebih efisien (jika dibanding dengan forum yang lebih besar yang mencakup ratusan negara) namun cukup representatif untuk masing-masing kekuatan ekonomi regional, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Keterbukaan forum ini terhadap rekomendasi dan input pemuda juga merupakan contoh dimana pemuda, sebagai penerus estafet kepemimpinan, juga harus dilibatkan secara aktif untuk memikirkan solusi masalah global.

Di level domestik, IYD juga melakukan beragam kegiatan yang bertujuan untuk menampung sebanyak mungkin aspirasi pemuda, di luar dari mereka yang terpilih sebagai delegasi Indonesia. Berbagai inisiatif sebagai pembentukan komunitas IYD, ambassadorship, kegiatan offline (seperti *Meet the Diplomats*, *Regional Dialogue*, *Goes to Campus*, *Youth Talk*) dan online (seperti IYD Tag, live stream, dan kampanye sosial media lainnya) bertujuan untuk melebarkan inklusivitas jaringan aspirasi pemuda yang akan direpresentasikan di Y20 Summit. Kegiatan-kegiatan ini umumnya mengangkat konsep dimana pemuda dapat berinteraksi secara langsung dengan pakar bidang yang sedang dibahas di level global G20, dan melakukan fasilitasi diskusi (FGD) terkait potensi solusi yang dapat diimplementasi.

Beberapa *flagship programme* IYD juga mendorong peningkatan kapasitas pemuda dalam berdiplomasi dan menyalurkan kepentingan pemuda ke pemangku kebijakan, bahkan di level lokal. Bekerja sama dengan Eco Nusa, IYD melakukan pelatihan intensif diplomasi, *public speaking*, dan peningkatan kesadaran lingkungan, pemanasan global, inklusivitas, dan preservasi hutan di Papua Barat. IYD juga menjadi pionir diskursus penting terkait isu-isu vital kepemudaan, seperti Future of Work, peran perempuan, identitas politik, perubahan iklim, dan sebagainya. Di sisi digital dan online, IYD juga bekerja sama dengan U-Report UNICEF, yang menggunakan *bot* melalui kotak masuk sosial media untuk menjadi lebih dari 3,000 aspirasi pemuda di berbagai isu kritis.



Gambar 2. Jajak Pendapat IYD melalui UNICEF U-Report untuk Y20 Summit Argentina 2018: <https://indonesia.ureport.in/poll/2863/>



Gambar 3. Jajak Pendapat IYD melalui UNICEF U-Report untuk Y20 Summit Jerman 2017: <https://indonesia.ureport.in/poll/2033/>

III. Kesimpulan

Tren anti-multilateralisme dan identitas politik untuk memenangkan dukungan politik merupakan sebuah ancaman serius yang dapat memberikan implikasi sosial, ekonomi, dan keamanan, di berbagai belahan dunia. Berbagai

contoh kasus seperti konflik Rohingya, Tibet-RRT, Brexit, kebijakan anti-migran Trump, perang kebijakan perdagangan AS-RRT, merupakan sebagian kecil permasalahan anti-multilateral yang memiliki dampak regional dan global. Untuk memecahkan isu global, diperlukan wadah untuk memfasilitasi komunikasi dan kepentingan berbagai pihak secara terbuka dan inklusif. Pemuda patut mengambil peran untuk turut memengaruhi pengambilan kebijakan yang pro-diversitas melalui keterpaparan pada isu dan forum multilateral. Indonesian Youth Diplomacy, IYD, menjadi salah satu alternatif yang secara aktif memberikan ruang bagi pemuda untuk menjadi bagian dari solusi masalah global melalui forum Y20 Summit sebagai forum resmi yang memberikan rekomendasi pada G20's Leaders Summit. Semangat multilateralisme perlu didorong, terutama di kalangan pemuda, untuk terus menghargai pentingnya komunikasi multi-arah, keterbukaan, dan inklusivitas pemuda, untuk membantu mengarusutamakan kembali kerja sama global.